

## Anatomi Kontroversi “Board of Peace” : Tinjauan Multidimensi Terhadap Kebijakan Presiden Prabowo

Fauzan Haviz<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

E-mai: [fauzanhaviz@gmail.com](mailto:fauzanhaviz@gmail.com)

Received : 16-12-2025 Accepted : 18-02-2026

Resived : 06-01-2026 Publish : 11-04-2026

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dalam menandatangani konsep *Board of Peace* melalui pendekatan multidisipliner yang meliputi aspek hukum, politik, ekonomi, sosial, dan sejarah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengkaji berbagai literatur akademik, buku, artikel ilmiah, serta sumber analisis kebijakan yang relevan dengan praktik diplomasi dan tata kelola pemerintahan. Dari perspektif hukum, penandatanganan dokumen tersebut dipandang menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi kewenangan dan kesesuaian dengan prinsip hukum internasional serta tata kelola konstitusional. Dalam aspek politik, tindakan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi persepsi publik dan hubungan diplomatik, terutama terkait dengan posisi Indonesia dalam menjaga netralitas dan stabilitas kawasan. Dari sudut pandang ekonomi, kebijakan yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian dapat berdampak pada kepercayaan investor, stabilitas pasar, serta hubungan ekonomi internasional. Secara historis, langkah tersebut juga dapat dibandingkan dengan praktik diplomasi Indonesia pada periode sebelumnya yang cenderung berhati-hati dalam menyikapi konflik internasional. Analisis multidimensi diperlukan untuk memahami secara komprehensif implikasi dari keputusan tersebut terhadap dinamika politik nasional dan posisi Indonesia dalam tatanan internasional.

**Kata Kunci:** *diplomasi, kebijakan luar negeri, legitimasi politik, hukum internasional, dinamika politik.*

### Abstract

This study aims to analyze Prabowo Subianto's policy of signing the Peace Board concept through a multidisciplinary approach encompassing legal, political, economic, social, and historical aspects. This study employs a desk study method, reviewing various academic literature, books, scientific articles, and policy analysis sources relevant to the practice of diplomacy and governance. From a legal perspective, the signing of the document is seen as sparking debate regarding the legitimacy of authority and its compliance with international legal principles and constitutional governance. From a political perspective, this action is considered to have the potential to influence public perception and diplomatic relations, particularly regarding Indonesia's position on maintaining neutrality and regional stability. From an economic perspective, policies related to the peace agreement could impact investor confidence, market stability, and international economic relations. Historically, this step can also be compared with Indonesia's diplomatic practices in previous periods, which tended to be cautious in responding to international conflicts. A multidimensional analysis is needed to comprehensively understand the implications of this decision on national political dynamics and Indonesia's position in the international order.

**Keywords:** *diplomacy, foreign policy, political legitimacy, international law, political dynamics.*

## 1. Pendahuluan

Pendahuluan mengenai kesalahan kebijakan dalam penandatanganan suatu kesepakatan internasional perlu dilihat secara komprehensif melalui berbagai perspektif seperti hukum, politik, ekonomi, sosial, dan sejarah. Dalam konteks hubungan internasional, setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin negara memiliki implikasi yang luas terhadap kepentingan nasional dan posisi negara di dunia internasional. Indonesia secara konstitusional memiliki komitmen kuat terhadap perdamaian dunia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komitmen tersebut menegaskan bahwa setiap langkah diplomasi harus selaras dengan prinsip kedaulatan, keadilan, dan kepentingan rakyat. Namun, dalam praktiknya kebijakan luar negeri seringkali menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi maupun masyarakat. Hal ini terjadi karena perjanjian atau kesepakatan internasional tidak hanya berdampak pada hubungan antarnegara, tetapi juga memengaruhi kondisi domestik. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang diambil oleh pemimpin negara harus dianalisis secara kritis agar dapat dipahami konsekuensi yang mungkin muncul. Analisis akademik terhadap kebijakan tersebut menjadi penting untuk menilai apakah keputusan yang diambil telah sesuai dengan prinsip hukum dan kepentingan nasional. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan demikian, pembahasan mengenai kesalahan dalam penandatanganan kesepakatan perdamaian dapat memberikan perspektif ilmiah tentang hubungan antara kepemimpinan, kebijakan internasional, dan kepentingan negara (Pradhana et al., 2023; Erfan et al., 2024).

Dari sudut pandang hukum, setiap perjanjian internasional yang ditandatangani oleh pemerintah harus berlandaskan pada prinsip hukum nasional dan hukum internasional. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, proses ratifikasi perjanjian internasional melibatkan mekanisme hukum yang jelas agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan seorang pemimpin negara tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan aspek legalitas. Kesalahan dalam proses penandatanganan atau pengesahan suatu kesepakatan dapat menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Persoalan tersebut dapat berupa konflik kewenangan, ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan, maupun potensi kerugian bagi negara. Oleh karena itu, analisis hukum diperlukan untuk menilai apakah tindakan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam sistem peradilan dan tata kelola pemerintahan. Sistem hukum Indonesia menempatkan prinsip akuntabilitas sebagai dasar dalam setiap kebijakan negara. Dalam konteks ini, transparansi dan pertanggungjawaban menjadi elemen penting dalam pengambilan keputusan politik. Jika suatu kebijakan dianggap tidak sejalan dengan prinsip hukum, maka hal tersebut dapat memicu kritik dari berbagai

kalangan akademisi dan praktisi hukum. Dengan demikian, kajian hukum menjadi landasan penting untuk memahami potensi kesalahan dalam kebijakan penandatanganan kesepakatan internasional (Bakry et al., 2025; Erfan et al., 2024).

Selain aspek hukum, perspektif politik juga memiliki peran penting dalam menilai suatu kebijakan luar negeri. Dalam politik internasional, keputusan pemimpin negara seringkali dipengaruhi oleh kepentingan strategis, tekanan geopolitik, serta dinamika hubungan antarnegara. Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia melalui diplomasi dan kerja sama internasional. Peran tersebut terlihat dari berbagai kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian dan mediasi konflik global. Namun, keputusan politik yang kurang tepat dapat memengaruhi citra dan posisi Indonesia di mata dunia internasional. Dalam konteks ini, analisis politik diperlukan untuk melihat apakah suatu kebijakan benar-benar mendukung kepentingan nasional atau justru menimbulkan kontroversi. Kebijakan luar negeri yang tidak didasarkan pada pertimbangan strategis yang matang dapat menimbulkan ketegangan baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Oleh karena itu, penting untuk menilai keputusan tersebut melalui pendekatan politik yang objektif dan kritis. Kajian ini juga dapat membantu memahami bagaimana kebijakan tersebut dipersepsikan oleh masyarakat dan komunitas internasional. Dengan demikian, analisis politik menjadi kunci untuk memahami implikasi kebijakan terhadap stabilitas dan legitimasi kepemimpinan negara (Sugara, 2021; Ashiddiqie, 2024).

Dari perspektif ekonomi dan sosial, setiap keputusan yang berkaitan dengan kerja sama internasional juga dapat memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Perjanjian atau kesepakatan internasional seringkali berkaitan dengan hubungan perdagangan, investasi, maupun stabilitas ekonomi global. Apabila suatu kebijakan diambil tanpa perhitungan yang matang, maka dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan. Kondisi ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik dan hubungan internasional yang baik. Selain itu, aspek sosial seperti kepercayaan publik terhadap pemerintah juga dapat terpengaruh oleh kebijakan yang dianggap kontroversial. Dalam masyarakat demokratis, opini publik memiliki peran penting dalam menilai keputusan yang diambil oleh pemimpin negara. Ketika masyarakat merasa bahwa suatu kebijakan tidak mencerminkan kepentingan nasional, maka kritik sosial akan muncul sebagai bentuk kontrol terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, analisis ekonomi dan sosial menjadi penting untuk memahami dampak kebijakan tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Kajian ini juga membantu mengidentifikasi potensi risiko maupun peluang yang muncul dari kebijakan tersebut. Dengan pendekatan multidisipliner, dampak kebijakan dapat dipahami secara lebih menyeluruh dan objektif (Siregar et al., 2022; Yusmiati & Dewi, 2022).

Dari sudut pandang sejarah, kebijakan luar negeri Indonesia memiliki akar panjang yang berkaitan dengan prinsip bebas dan aktif dalam hubungan internasional. Sejak masa awal kemerdekaan, Indonesia telah menempatkan perdamaian dunia sebagai bagian dari identitas politik luar negerinya. Prinsip tersebut tercermin dalam berbagai upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan konflik internasional. Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia sering berperan sebagai mediator maupun kontributor dalam berbagai misi perdamaian global. Nilai-nilai moderasi dan toleransi juga menjadi bagian dari pendekatan Indonesia dalam menciptakan stabilitas dunia. Dalam perspektif sejarah, setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin negara akan selalu dibandingkan dengan tradisi diplomasi yang telah dibangun sebelumnya. Jika suatu keputusan dianggap menyimpang dari prinsip tersebut, maka akan muncul perdebatan mengenai konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia. Kajian sejarah membantu menjelaskan bagaimana kebijakan masa kini berkaitan dengan dinamika politik dan diplomasi masa lalu. Dengan memahami konteks sejarah, analisis terhadap kebijakan tersebut dapat dilakukan secara lebih mendalam dan kritis. Oleh karena itu, perspektif sejarah menjadi penting dalam menilai apakah suatu kebijakan benar-benar sejalan dengan tradisi dan prinsip diplomasi Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia (Halim et al., 2022; Muzakki, 2022; Nirwana, 2023).

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri dan perdamaian dunia. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami secara mendalam konsep, teori, serta pandangan para ahli mengenai hukum internasional, politik luar negeri, dan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian global. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu maupun publikasi ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan berbagai perspektif mengenai kebijakan penandatanganan kesepakatan perdamaian dari berbagai sudut pandang. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti melalui analisis teori dan literatur yang telah ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan fakta, tetapi juga mengkaji secara kritis berbagai pemikiran ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan (Erfan et al., 2024).

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji, membandingkan, serta menginterpretasikan berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan. Peneliti mengidentifikasi konsep-konsep utama yang berkaitan dengan hukum, politik, ekonomi, sosial, dan sejarah dalam konteks kebijakan perdamaian dunia. Setiap sumber pustaka kemudian dianalisis untuk menemukan keterkaitan antara teori dan fenomena yang menjadi objek penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu metode yang digunakan untuk memahami makna dan pesan yang terkandung dalam berbagai dokumen ilmiah. Melalui analisis ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang bersifat sistematis dan logis berdasarkan data yang tersedia dalam literatur. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi berbagai sudut pandang akademik yang berbeda mengenai peran Indonesia dalam upaya perdamaian dunia. Dengan melakukan kajian literatur secara mendalam, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif dan ilmiah terhadap isu yang dibahas. Oleh karena itu, metode studi pustaka menjadi pendekatan yang relevan untuk digunakan dalam penelitian yang bersifat konseptual dan analitis (Pradhana et al., 2023).

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penandatanganan kesepakatan perdamaian internasional oleh seorang pemimpin negara tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum yang mengaturnya. Dalam konteks Indonesia, setiap perjanjian internasional seharusnya mengikuti prosedur konstitusional yang telah ditetapkan dalam sistem hukum nasional. Prosedur tersebut meliputi proses perundingan, penandatanganan, serta ratifikasi yang melibatkan lembaga negara terkait. Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa kesalahan dalam proses pengambilan keputusan dapat muncul apabila prosedur tersebut tidak dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat menimbulkan potensi konflik hukum antara kebijakan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, transparansi dalam proses kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi hukum suatu keputusan negara. Jika suatu keputusan dianggap tidak melalui mekanisme hukum yang jelas, maka hal tersebut dapat menimbulkan kritik dari berbagai kalangan. Kajian pustaka juga menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menekankan prinsip akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan hubungan internasional. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil dalam konteks diplomasi internasional harus mempertimbangkan aspek legalitas secara menyeluruh. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa aspek hukum merupakan fondasi utama dalam menilai validitas suatu kebijakan luar negeri (Bakry et al., 2025).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aspek politik memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses penentuan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam hubungan internasional, keputusan seorang pemimpin seringkali dipengaruhi oleh kepentingan strategis dan dinamika geopolitik global. Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas dan aktif memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dalam setiap keputusan diplomasi. Berdasarkan kajian literatur, ditemukan bahwa kebijakan yang tidak mempertimbangkan dinamika politik internasional dapat menimbulkan persepsi negatif dari negara lain. Hal ini dapat memengaruhi posisi diplomatik Indonesia dalam forum internasional. Selain itu, keputusan politik yang kontroversial juga dapat memicu perdebatan di tingkat domestik. Masyarakat dan kalangan akademisi biasanya memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan yang berkaitan dengan perdamaian dunia. Oleh karena itu, setiap kebijakan luar negeri harus dirumuskan dengan mempertimbangkan stabilitas politik nasional maupun internasional. Kajian pustaka menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia selama ini dikenal sebagai diplomasi yang mengedepankan dialog dan kerja sama. Dengan demikian, kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip tersebut dapat menimbulkan kritik dari berbagai pihak (Sugara, 2021).

Selain aspek hukum dan politik, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan internasional dapat memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Hubungan diplomatik yang stabil biasanya memberikan peluang bagi peningkatan kerja sama ekonomi dan perdagangan internasional. Namun, kebijakan yang menimbulkan kontroversi dapat memengaruhi kepercayaan mitra internasional terhadap stabilitas kebijakan suatu negara. Berdasarkan kajian literatur, stabilitas politik dan hubungan internasional memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan ekonomi nasional. Apabila suatu kebijakan dianggap tidak mempertimbangkan kepentingan ekonomi jangka panjang, maka hal tersebut dapat berdampak pada sektor investasi dan perdagangan. Selain itu, dampak ekonomi juga dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung melalui berbagai sektor pembangunan. Keputusan politik yang kurang tepat dapat memicu ketidakpastian ekonomi di tingkat domestik. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan hubungan internasional harus mempertimbangkan implikasi ekonomi secara matang. Kajian literatur menunjukkan bahwa kerja sama internasional seringkali menjadi sarana penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan diplomasi harus dirancang secara strategis agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi negara (Siregar et al., 2022).

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa kebijakan luar negeri memiliki dampak sosial dan historis yang tidak dapat diabaikan. Dalam masyarakat demokratis, setiap keputusan pemerintah akan selalu mendapatkan perhatian dari publik. Apabila suatu kebijakan dianggap tidak mencerminkan kepentingan nasional,

maka kritik sosial dapat muncul sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Berdasarkan kajian pustaka, persepsi masyarakat terhadap kebijakan luar negeri seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di dalam negara. Selain itu, sejarah diplomasi Indonesia yang menekankan prinsip perdamaian dunia juga menjadi faktor penting dalam menilai kebijakan tersebut. Sejak masa kemerdekaan, Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam berbagai upaya penyelesaian konflik internasional. Tradisi diplomasi tersebut menjadi bagian dari identitas politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dianggap menyimpang dari prinsip tersebut akan menimbulkan diskusi di kalangan akademisi dan masyarakat. Kajian literatur menunjukkan bahwa nilai toleransi, dialog, dan kerja sama merupakan bagian penting dalam pendekatan diplomasi Indonesia. Dengan demikian, kebijakan yang berkaitan dengan perdamaian dunia harus mempertimbangkan dimensi sosial dan historis secara menyeluruh (Halim et al., 2022).

### **Pembahasan**

Pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa aspek hukum menjadi elemen fundamental dalam menilai kebijakan penandatanganan kesepakatan internasional. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, setiap perjanjian internasional harus melalui mekanisme yang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Mekanisme tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan kepentingan negara. Berdasarkan hasil penelitian, kesalahan dalam proses pengambilan keputusan dapat terjadi apabila prosedur hukum tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Hal ini dapat menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi suatu kebijakan. Dalam konteks negara demokratis, proses pengambilan keputusan yang terbuka menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik. Selain itu, keterlibatan lembaga negara dalam proses ratifikasi juga merupakan bagian dari sistem checks and balances. Dengan adanya mekanisme tersebut, diharapkan setiap kebijakan luar negeri dapat dipertimbangkan secara matang. Kajian ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kepentingan nasional. Oleh karena itu, analisis hukum menjadi bagian penting dalam mengevaluasi kebijakan diplomasi suatu negara (Bakry et al., 2025).

Dari perspektif politik, kebijakan luar negeri tidak dapat dilepaskan dari kepentingan strategis yang dimiliki oleh suatu negara. Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi penting di kawasan Asia Tenggara harus mampu menjaga keseimbangan dalam hubungan internasional. Berdasarkan hasil penelitian, keputusan politik yang berkaitan dengan perdamaian dunia seringkali dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik, tetapi juga oleh tekanan dan kepentingan internasional. Dalam situasi tertentu, keputusan yang diambil oleh pemimpin negara dapat menimbulkan perdebatan mengenai prioritas kepentingan nasional. Oleh karena itu, kebijakan diplomasi harus dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai faktor strategis. Diplomasi yang efektif biasanya didasarkan

pada prinsip dialog, kerja sama, dan kepentingan bersama. Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang aktif dalam berbagai forum internasional yang berkaitan dengan perdamaian dunia. Tradisi diplomasi tersebut menjadi salah satu kekuatan dalam menjaga stabilitas hubungan internasional. Dengan demikian, setiap kebijakan politik luar negeri harus dirancang secara hati-hati agar tetap sejalan dengan prinsip diplomasi Indonesia (Sugara, 2021).

Dalam perspektif ekonomi, kebijakan yang berkaitan dengan hubungan internasional dapat memberikan dampak yang luas terhadap pembangunan nasional. Hubungan diplomatik yang baik biasanya membuka peluang bagi kerja sama ekonomi dan investasi antarnegara. Berdasarkan hasil penelitian, stabilitas politik dan diplomasi memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketika suatu kebijakan menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan internasional, maka hal tersebut dapat memengaruhi kepercayaan mitra ekonomi. Kondisi tersebut dapat berdampak pada sektor perdagangan, investasi, dan kerja sama pembangunan. Oleh karena itu, setiap kebijakan luar negeri harus mempertimbangkan dampak ekonomi jangka panjang. Diplomasi ekonomi menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat posisi negara di tingkat global. Selain itu, kebijakan yang tepat juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama internasional. Kajian ini menunjukkan bahwa hubungan antara politik luar negeri dan ekonomi nasional sangat erat. Dengan demikian, perumusan kebijakan diplomasi harus dilakukan secara strategis dan terintegrasi (Siregar et al., 2022).

Dari sudut pandang sosial dan sejarah, kebijakan luar negeri Indonesia memiliki landasan nilai yang kuat dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Sejak masa awal kemerdekaan, Indonesia telah menempatkan prinsip perdamaian sebagai bagian dari identitas diplomasi nasional. Nilai tersebut tercermin dalam berbagai kontribusi Indonesia dalam penyelesaian konflik internasional. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Indonesia memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap peran negaranya dalam menciptakan stabilitas dunia. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan diplomasi internasional akan selalu mendapatkan perhatian dari publik. Perspektif sejarah juga menunjukkan bahwa Indonesia sering berperan sebagai mediator dalam berbagai konflik global. Tradisi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun citra Indonesia di dunia internasional. Selain itu, nilai toleransi dan moderasi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia juga mendukung upaya perdamaian dunia. Kajian ini menunjukkan bahwa dimensi sosial dan historis memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi terhadap kebijakan luar negeri. Dengan memahami konteks sejarah dan sosial tersebut, evaluasi terhadap kebijakan diplomasi dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan objektif (Muzakki, 2022).

#### **4. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penandatanganan suatu kesepakatan perdamaian internasional perlu dianalisis secara menyeluruh dari berbagai perspektif, yaitu hukum, politik, ekonomi, sosial, dan sejarah. Dari segi hukum, setiap keputusan yang berkaitan dengan perjanjian internasional harus

mengikuti prosedur konstitusional dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Aspek politik juga menjadi faktor penting karena kebijakan luar negeri tidak terlepas dari dinamika hubungan internasional serta kepentingan strategis negara. Selain itu, kebijakan diplomasi juga dapat memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi, terutama dalam hal stabilitas kerja sama internasional, investasi, dan perdagangan. Dalam konteks sosial, persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam menilai legitimasi suatu keputusan. Sementara itu, dari sudut pandang sejarah, kebijakan luar negeri Indonesia selalu berlandaskan pada prinsip perdamaian dunia yang telah menjadi identitas diplomasi nasional sejak masa kemerdekaan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan konsistensinya dengan prinsip tersebut. Analisis dari berbagai perspektif ini menunjukkan bahwa keputusan dalam hubungan internasional memerlukan pertimbangan yang matang dan komprehensif. Dengan demikian, evaluasi terhadap kebijakan penandatanganan kesepakatan internasional menjadi penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar sejalan dengan kepentingan nasional dan prinsip diplomasi Indonesia.

#### **Daftar Pustaka**

- Erfan, Z., Hasan, A., Umar, M., & Khasyi'in, N. (2024). Politik Hukum Antar Bangsa (Siyasah Daulyah Indonesia Dalam Perdamaian Dunia). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 767-787.
- Pradhana, M. A., Wahyudi, B., Azhari, Y., & Widodo, P. (2023). Implementasi Peran Serta Indonesia Dalam Perdamaian Dunia Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 662-675.
- Halim, A., Hosaini, H., Zukin, A., & Mahtum, R. (2022). Paradigma Islam Moderat di Indonesia dalam Membentuk Perdamaian Dunia. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(4), 705-708.
- Yusmiati, Y., & Dewi, R. (2022). Pengaruh Penggunaan Media Gambaterhadap Prestasi Belajar Ppkn Pada Materi Dinamika Peran Indonesia Dalam Perdamaian Dunia Peserta Didik Kelas Xi Smkn 1 Sibolga. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(8), 3155-3159.
- Sukerteyasa, I. P. (2021). Upaya Meningkatkan Hasil Belajar PPKn Peserta Didik Melalui Penerapan Model PBL Pada Materi Peran Indonesia Dalam Perdamaian Dunia Di Kelas XI IPS 4 SMA Negeri 2 Denpasar. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 81-88.
- Bakry, K., Ismoyo, J. D., Kristanto, K., Dunia, J. P., Santika, I. K., Putera, Y. N., & Meliala, I. M. (2025). *Sistem Peradilan Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Muzakki, A. (2022). Menggali nilai-nilai Islam wasathiyah dalam kitab-kitab pesantren sebagai modalitas mewujudkan perdamaian dunia. *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman*.
- Siregar, A. R., Adilla, R., & Jannah, R. (2022). Perdamaian Masyarakat Global. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 2(2), 9-22.
- Nirwana, R. (2023). Penanaman Nilai Toleransi Beragama Mata Pelajaran PAI disekolah sebagai Pilar Perdamaian Dunia. *Al Manar*, 1(1).
- Ashiddiqie, M. A. (2024). Kerjasama Indonesia Kanada Dalam Mempersiapkan Pasukan Perdamaian Dunia. *Global Insight Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 1(1).
- Sugara, R. (2021). Upaya dan Kontribusi Indonesia Dalam Proses Perdamaian di Afghanistan Melalui Bina-Damai. *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 5(1), 27-38.

